

Analisis perpajakan cross border turnkey project pada negara Indonesia India dan Jerman = Analysis of cross border taxation turnkey project in state of Indonesia India and Germany / Rianto Abimail

Rianto Abimail, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364828&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai aspek perpajakan cross border turnkey project pada Negara Indonesia, India dan Jerman. Turnkey project merupakan suatu proyek konstruksi atau peralatan atau mesin yang dijual, dimana penjual menyediakan seluruh fasilitas proyek supaya proyek tersebut siap untuk digunakan oleh pembeli. Turnkey project terdiri dari kegiatan desain, pengadaan barang, konstruksi, perakitan, instalasi dan pengawasan serta pengujian konstruksi, peralatan, atau mesin yang dipasang. Pemajakan turnkey project menjadi permasalahan apabila turnkey project dibuat dengan hanya satu kontrak untuk seluruh kegiatan yang dilakukan khususnya transaksi lintas negara. Permasalahan terutama ketika menentukan adanya BUT di Negara BUT berada, penentuan adanya atribusi laba kepada BUT, dan perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatankegiatan yang dilakukan antar Negara. Untuk memahami permasalahan yang ada, maka perlunya pemahaman UU Domestik di suatu Negara, P3B dan Protokol P3B yang berlaku serta pemahaman ketentuan interpretasi P3B berdasarkan konvensi Wina.

<hr>

ABSTRACT

This thesis discusses about the tax aspects of cross border turnkey project in state of Indonesia, India, and Germany. Turnkey project is a project for sale of construction or equipment or machinery, where the seller provides all facilities for the project so that the project is ready to be used by the purchaser. Turnkey project activity consists of the design, goods supply, construction, assembly, installation, supervision, and commissioning construction, equipment, or machinery is already assembled. Taxation turnkey project become a problem if the project is made with only one contract for all activities undertaken especially for the cross border transaction. The problems, especially when determining the existence of PE, the determination of the attribution profit of PE, and income tax treatment from the activities carried out between Contracting States. To understand the problems, We need understanding of domestic law in a State, applicable Tax Treaty and Tax Treaty Protocol, and understanding the rule of tax treaty interpretation by the Vienna Convention.